

SEBUAH POTRET UTUH

Tembakau. Sepucuk tanaman. Sebuah komoditas. Menghidupi puluhan ribu keluarga petani—dan ini bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Mengunjungi wilayah-wilayah sentral penanaman tembakau, kita, orang luar, akan tercenang melihat bagaimana tanaman ini telah melesap ke dalam darah-daging warga sekitar. Slametan, hajatan spiritual, depresi massal, kebiasaan sepele sehari-hari; nyaris setiap partikel kehidupan warga wilayah produksi tembakau amat ditentukan oleh naik-turunnya harga komoditas tanaman tersebut yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Beberapa tahun belakangan ini, rokok, produk yang memungkinkan tembakau memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dihadang oleh regulasi-regulasi kesehatan nasional dan internasional. Kontroversi pengendalian tembakau di Indonesia bermula dari adanya Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*The WHO Framework Convention on Tobacco Control/WHO FCTC*) yang menempatkan tembakau sebagai zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Perdebatan itu yang membuat Indonesia, meski merupakan salah satu inisator WHO FCTC, hingga kini belum mera-

tifikasi konvensi tersebut. Alasan kesehatan menjadi dalih utama pendukung ratifikasi.

Barisan rapat yang lantang mengampanyekan pengendalian tembakau percaya rokok mengganggu kesehatan mereka yang mengonsumsinya—terhitung juga para perokok pasif yang sama sekali tak menikmati kepulan asap tersebut. Pembaca tentunya pernah menjumpai poster kampanye kesehatan yang memajang gambar tubuh para perokok, dan melihat bagaimana organ-organ tubuh para perokok digambarkan compang-camping tidak karuan. Asap rokok mencabik-cabik tubuh para pengonsumsinya dari dalam, begitulah kira-kira citra dampak negatif rokok yang diyakini berbagai pihak.

Namun, bukan berarti semuanya percaya dan satu suara dengan argumentasi-argumentasi kesehatan yang dipaparkan oleh para pelaku kampanye antirokok. Jelas saja. Para penolak ratifikasi WHO FCTC memandang konvensi ini dan turunannya dalam RPP dan RUU Tembakau di Indonesia hanya akan menyengsarakan masyarakat kelas bawah saja, terutama buruh pabrik rokok dan petani tembakau yang akan kehilangan pekerjaannya. Tak sedikit suara miring bermunculan dari mereka yang menggantungkan periuk nasinya dari industri rokok. Ada yang mendatangkan seorang kakek perokok berat berusia 90-an tahun dan bertubuh bugar, pada saat menuntut pengkajian ulang peraturan antitembakau. Tak sedikit yang meyakini, serangan terhadap rokok—khususnya jenis kretek yang kadar nikotinnya tinggi—merupakan bagian dari konspirasi besar perusahaan-perusahaan rokok putih yang memperluas pasar ke Indonesia. Sebuah proses pembunuhan besar-besaran, mereka percaya, sedang dilakukan oleh korporat global se-

cara senyap lewat jalur belakang, jalur legal-formal, lantaran pengusaha-pengusaha rokok dunia ini tidak sanggup mengambil alih perusahaan rokok lokal secara langsung.

Wanda Hamilton, dalam bukunya yang berjudul *Nicotine War* (2010), mengemukakan bahwa terlalu naif untuk melihat konvensi pengendalian tembakau semata berangkat dari dalih-dalih kesehatan. Aktivistis yang memandang globalisasi dengan skeptis ini mengajak pembacanya menengok sisi lain dari kontroversi tembakau: ia tidak lain adalah pertarungan perusahaan-perusahaan raksasa global. Pendukung utama gerakan antitembakau adalah tiga perusahaan farmasi global (Novartis, Glaxo Wellcome, dan Pharmacia & Upjohn) yang, dipaparkan Hamilton, juga menjadi penyokong dana program pengendalian tembakau melalui Prakarsa Bebas Tembakau (*Free Tobacco Initiative/FTI*) dan melahirkan WHO FCTC. Perusahaan-perusahaan ini adalah produsen utama *Nicotine Replacement Treatment* (NRT), produk terapi pengganti nikotin yang diakui efektif memacu individu menghentikan kebiasaan merokok. Dengan kata lain, kampanye kemanusiaan antitembakau merupakan selubung pemasaran produk industri farmasi. Situasi ini digambarkan oleh Hamilton (2010) sebagai “perang nikotin”, perang antara pedagang obat dengan pedagang rokok!

Kita, dalam buku ini, tidak akan masuk ke dalam perdebatankses rokok bagi kesehatan yang tampak tidak akan berujung dalam waktu dekat ini. Kita juga tidak akan mencoba menganalisis dinamika kepentingan korporat, sesuatu yang masih sukar untuk kita raba secara langsung, sulit untuk kita temukan bukti-bukti kuatnya. Meski bisa saja benar apa yang dipaparkan oleh para proponent kampanye pengendalian rokok bahwa nikotin menyebabkan gang-

guan-gangguan kesehatan yang serius; meski argumentasi-argumentasi mereka solid dan punya fondasi, buku ini akan memperlihatkan kehidupan para petani di wilayah yang perekonomiannya benar-benar bertumpu pada komoditas tembakau.

Selama ini, implikasi tidak langsung dan tidak disengaja dari kampanye antirokok adalah mendatangkan citra buruk kepada mereka yang terlibat dalam rantai produksi komoditas yang dituding merusak kesehatan sebagian warga dunia ini. Sekurang-kurangnya, dalam praktik di lapangan, kampanye ini begitu menggebu-gebu dalam mengekspos eksek produk jadi tembakau, eksek negatifnya bagi kesehatan yang tak jarang divisualisasikan dengan *horrific*, sehingga di sisi lain menghilangkan adegan-adegan bagaimana tembakau ini ditanam, dirawat dengan tekun oleh para petani, agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak.

Dalam buku ini, kita akan mendapati potret mereka yang seumur hidupnya menanam tembakau; inilah upaya untuk memperlihatkan perekonomian tembakau secara lebih utuh dan lengkap. Apa yang didesakkan oleh negara dan berbagai pihak yang mendukung regulasi pengendalian tembakau boleh jadi baik, tetapi kebijakan suatu negara tidak boleh tidak harus mengindahkan semua aspek yang terlibat di dalamnya. Mempertimbangkan separuh-separuh, mempertimbangkan hanya dua-tiga persen dari 250 juta penduduk dalam pembuatan kebijakan, katakanlah, hanya akan mengerucutkan kebijakan yang fatal, bahkan terbilang otoriter.

Pertama-tama, jelas, Indonesia adalah negara agraris. Sektor pertanian memegang peran yang tak tergantikan

dalam pembangunan. Data BPS 2010 memperlihatkan, sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sampai dengan Februari 2010, sekitar 42,8 juta orang atau 40% dari total angkatan kerja nasional (107,4 juta orang) terserap oleh sektor ini. Dalam perjalanan darat antarkota di Indonesia, sebagian besar waktu akan kita habiskan dengan melihat sawah yang menghampar tak habis-habis. Itulah realitas Indonesia.

Di antara berbagai komoditas pertanian, tembakau adalah salah satu komoditas yang sangat penting kontribusinya terhadap perekonomian. Belum lagi, kemampuannya dalam membangun jaringan sosial, bahkan menjadi kultur yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat. Di beberapa daerah, seperti Temanggung dan Pamekasan, tembakau bahkan menjadi komoditas dominan yang menggerakkan kehidupan masyarakatnya. Secara nasional, pendapatan pemerintah dari cukai rokok pada tahun 2010 sebesar Rp 62,14 triliun atau melampaui target yang ditetapkan ABPN-Perubahan sebesar Rp 59,26 triliun, membuatnya menjadi penyumbang terbesar kedua setelah Migas (<http://www.tempointeraktif.com>, 21/12/2010).

Di mata internasional, Indonesia adalah negara dengan sederet prestasi di bidang pertembakauan; sebagai produsen tembakau terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Brasil, dan Zimbabwe; konsumen rokok terbesar ketiga dunia (*Jawa Pos*, 22 Agustus 2010); pemilik pabrik rokok terbanyak dunia termasuk di dalamnya pabrik kelas rumahan (*Kompas*, 14 Januari 2010). Artinya, Indonesia adalah salah satu pemasok tembakau maupun pasar potensial produk berbahan tembakau terbesar di dunia.

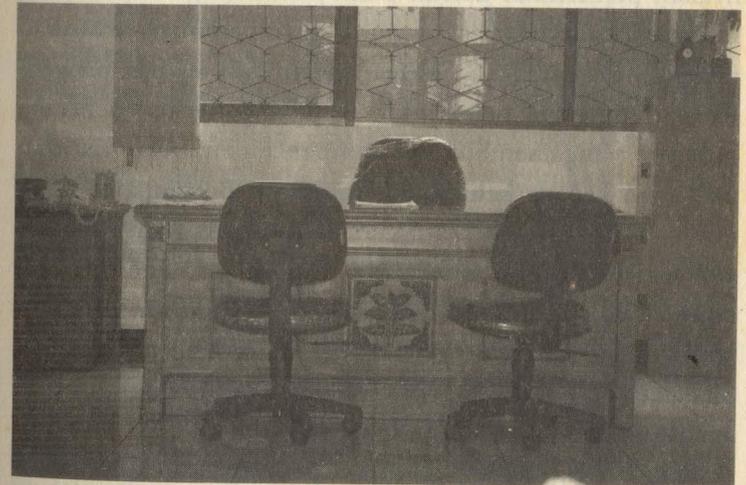
Kita belum masuk dalam seluk-beluk kehidupan para petani tembakau, warga negara yang hak hidupnya paling terancam oleh eksese-eksese ekonomi kebijakan pengendalian tembakau, tetapi, sedikit data makro ini saja telah menjelaskan betapa pentingnya komoditas ini bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tak usah membawa-bawa praduga adanya kepentingan global atau gurita korporasi dunia yang hendak membelitkannya di salah satu negara pengonsumsi tembakau terbesar ini, data yang terang ini sudah dengan sendirinya mempertanyakan, menggugat, memblejeti nalar politik yang mendasari kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau.

Meski berangkat dari alasan-alasan kesehatan dan konvensi internasional yang telah disebutkan di atas, fundamen-fundamen ini belum cukup kokoh untuk menjustifikasi tindakan negara yang akan mencacah-cacah pilar perekonomiannya sendiri hingga hak-hak sosial-ekonomi warga negaranya. Barangkali, memang, rokok merusak kesehatan. Penyakit-penyakit yang dideretkan di bawah sebuah bungkus rokok bisa jadi memang mengancam mereka yang menghisap dan mendapatkan kenikmatan darinya. Tetapi, mengendalikan tembakau, tanpa pandang bulu, hanya akan meninggalkan kerusakan yang lebih dahsyat dan brutal lagi. Ini menyangkut nasi yang terhidang di atas piring keluarga para petani yang selama hidupnya menggantungkan hidup pada tembakau.

Kebijakan pengendalian ini memang ditopang oleh beberapa hasil penelitian yang menempatkan pertanian tembakau tidak kompetitif secara ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan petani tembakau. Upah petani tembakau terendah di antara enam komoditas pertanian



Aksi keprihatinan petani tembakau



Ukiran Tembakau, simbol Kabupaten Temanggung, di meja Setda
(foto: Syukron)

(tebu, kelapa sawit, teh, kopi, coklat, tembakau) (Kompas, 29/2/2009). Menurut penelitian Lembaga Demografi FEUI, 66 persen buruh tani tembakau berpendidikan SD atau tidak sekolah sama sekali dan 58 persennya masih tinggal di rumah berlantai tanah (Kompas, 24/11/2010). Akan tetapi, kita juga memiliki data yang, hingga tingkat tertentu, dapat membantah berbagai hasil penelitian tersebut, selain juga akan menemukan secara langsung bagaimana di sejumlah wilayah—Sumedang, Temanggung, Demak, Malang, dan Pamekasan—faktanya, tembakau menjadi energi utama perekonomiannya. Regulasi tembakau bisa jadi mengoyak urat nadi vital yang menyuplai darah bagi perekonomian wilayah-wilayah ini.

Berbicara tentang peran pemerintah, di beberapa wilayah, memang ada pemerintah daerah yang berkontribusi dalam mengembangkan pertanian tembakau. Akan tetapi, kebanyakan pemerintah daerah tidak memiliki perhatian yang memadai, baik dalam mengembangkan pertanian tembakau maupun nontembakau. Sebagai bagian dari regulasi pengendalian tembakau, pemerintah mengampanyekan beberapa program yang membuatnya tampak mempunyai visi dan perhatian kepada kehidupan warganya. Beberapa di antaranya, pengalihan ke tanaman lain, diversifikasi produk jadi tembakau, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, ini semua tidak ditangani dengan serius. Program-program hanya mendatangkan pertanyaan ketimbang jawaban; di manakah negara ketika nafas warganya hendak diputus oleh peraturan-peraturan yang dibuatnya?

Sekali lagi, tulisan ini tidak menempatkan diri dalam posisi sepakat atau tidak dengan argumentasi kesehatan yang menjadi arsenal utama dalam kebijakan pengendalian

tembakau. Dengan menengok arti tak tergantikan tembakau bagi wilayah-wilayah sentral produksi komoditas tersebut, tulisan ini hendak berbicara bahwa yang paling pertama dan utama dilukai oleh pengontrolan tembakau adalah hak asasi para petani selaku warga negara Indonesia. Jelas-jelas, kebijakan pengendalian tembakau akan mencabut mereka dari sumber penghidupannya; dan lagi, negara nyaris tak memberikan jalan keluar, lepas tangan. Membiarkan orang-orang kecil itu, yang selama ini tak pernah merepotkan pemerintah, habis-habisan mencari jalan keluarnya masing-masing dari api yang telah disulut oleh negara.

PENGUMPULAN DATA

Data dalam buku ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan sepanjang Februari 2011. Penelitian tersebut dilakukan di lima wilayah yang dikenal sebagai daerah pertanian, utamanya tembakau, di Jawa, yaitu Sumedang (Jawa Barat), Demak dan Temanggung (Jawa Tengah), serta Malang dan Pamekasan (Jawa Timur). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, wawancara berkelompok, *Focus Group Discussion* (FGD), pengamatan (observasi), dan studi dokumen. Data diperoleh dari narasumber (informan) yang terbagi atas dua kelompok, yaitu utama (inti) dan pendukung. Narasumber utama pada masing-masing wilayah meliputi petani pemilik lahan tembakau, petani penggarap (penyewa lahan, buruh tani tembakau, serta petani pemilik lahan nontembakau, petani penggarap dan buruh tani nontembakau. Sedangkan narasumber pendukung men-

cakup pihak-pihak yang relevan dalam konteks pertanian tembakau dan nontembakau, seperti aparat pemerintah, pengamat pertanian, pedagang tembakau, grader, dan sebagainya. Berikut adalah uraian tentang pengumpulan data pada masing-masing wilayah.

Dalam penelitian di Sumedang, narasumber penelitian terdiri dari dua kelompok informan, yaitu informan inti dan pendukung. Informan inti meliputi tiga petani tembakau dan tiga petani padi. Petani tembakau mencakup petani pemilik lahan dan buruh tembakau. Sedangkan untuk petani padi, narasumbernya adalah pemilik lahan, buruh tani sekaligus penyewa lahan, dan buruh tani yang bukan penyewa atau pemilik lahan. Dalam pertanian tembakau, petani pemilik atau penyewa lahan terkadang juga merupakan buruh tani tembakau.

Narasumber pendukung adalah ketua kelompok tani tembakau Mekarwangi dan Gabungan Kelompok Tani Sinar Harapan dari Kecamatan Ujung Jaya; petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian dari Unit Pelaksana Teknis Badan untuk Kecamatan Ujung Jaya dan Tomo; aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya (Dinas Parsenibud); ketua APTI Kabupaten Sumedang dan APTI Provinsi Jawa Barat; anggota DPRD Kabupaten Sumedang; pengurus HKTI Kecamatan Ujung Jaya; ketua MWC NU Kecamatan Ujung Jaya dan ketua PC NU Kabupaten Sumedang; pemilik toko pertanian Cahaya Rezeki Tani yang selama ini banyak memberikan bantuan modal untuk petani tembakau di Cipinangpait.

Dalam penelitian di Demak, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah perpaduan antara studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para individu yang terkait langsung dengan pertanian di wilayah Banyumeneng dan Sumberejo. Mereka adalah petani penggarap, tengkulak, petugas penyuluh pertanian Kecamatan Mranggen, dan perangkat desa. Jumlahnya 13 orang. Meski informan yang terlibat dalam FGD sebanyak 38 orang, tetapi yang aktif hanya sekitar 10 orang; dari 10 orang ini yang berasal dari Banyumeneng 5 orang (petani, petani penggarap, dan aparat desa), Sumberejo 2 orang (petani tembakau), Girikusumo 1 orang (petani), dan Mranggen 2 orang (wartawan dan pengurus NU lokal).

Narasumber inti dalam penelitian di Malang terdiri atas empat orang pemilik lahan dan empat orang buruh tani/penggarap lahan. Mereka terbagi atas empat orang petani tembakau, dua orang buruh tani tembakau, serta petani padi dan tebu. Narasumber pendukung sebanyak tujuh orang, mencakup petani, pengusaha, tengkulak tembakau, ahli pertanian, dan aparat pemerintahan. Sedangkan untuk FGD, yang berpartisipasi sebanyak dua belas orang. Mereka terdiri atas petani tembakau, petani padi, pemilik lahan tebu, penggarap dan buruh tani, pengamat pertanian independen, dan pengepul tembakau.

Narasumber inti dalam penelitian di Temanggung terdiri dari empat orang petani tembakau dan empat orang petani kopi. Dari empat petani tembakau tersebut, dua orang adalah pemilik lahan di atas 1 ha, dua lainnya di bawah 1 ha. Demikian halnya dengan petani kopi, dua narasumber memiliki lahan di atas 1 ha dan dua lainnya di

bawah 1 ha. Pengumpulan data di Temanggung dilakukan dengan pengamatan, wawancara, wawancara berkelompok, dan FGD. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan rumah, kondisi lahan pertanian, dan keadaan fasilitas umum. Wawancara dilakukan di rumah masing-masing informan. Adapun wawancara berkelompok dilakukan di rumah salah satu informan dengan mengacu pada pedoman wawancara. FGD dilakukan di STAINU Temanggung dengan melibatkan para pihak yang terlibat dalam pertanian tembakau, seperti aparat Disperbunhut, pengurus APTI, petani tembakau dari Lereng Sumbing dan Sindoro, dan petani kopi Gesing.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian di Pamekasan adalah *Klebun Desa* (Kepala Desa) Tambung, Carik Desa Tambung, petani tembakau, karyawan pabrik rokok Gudang Garam (GG), Mantan Ranting GG, petani garam, petani tembakau di Kadur, Manajer Sampoerna, Kadishutbun, Mantan Kadishutbun, Kadisperindag, Kadiskes, Kadistan, Ketua APTP, dan Ketua KUTP, dan dosen pertanian Universitas Islam Madura (UIM). Adapun narasumber yang menjadi partisipan FGD diambil dari empat dusun di Desa Tambung (Dusun Biris Dajah, Biris Laok, Ninggara, dan Rengoh) dengan kategori pedagang, petani pemilik lahan yang kaya, petani pemilik lahan kecil, dan buruh tani. Per dusun terdiri atas empat orang partisipan, sehingga jumlah total peserta FGD adalah enam belas orang.

2

PERTANIAN TEMBAKAU DI LIMA WILAYAH JAWA

SUMEDANG

Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat potensial untuk sektor pertanian. Luas lahan tanaman padi sawah yang tersebar di 26 kecamatan Kabupaten Sumedang mencapai 69.366 ha dengan kapasitas produksi sebesar 437.209 ton, dan lahan tanaman padi ladang mencapai luas 8.781 ha dengan kapasitas produksi 25.002 ton. Sementara, tanaman tembakau yang tersebar di 26 kecamatan mencakup lahan seluas 2.496 ha dan memiliki kapasitas produksi 22.996 ton. Dari 26 kecamatan tersebut, produksi tanaman padi dan tembakau terbesar tersebar di Kecamatan Jatigede, Tomo, Ujung Jaya, dan Tanjungsari (lihat Tabel 2.1).